

DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Ali, Zainuddin, 2011. *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amal, Bakhrul, 2017. *“Pengantar Hukum Tanah Nasional (sejarah, politik, dan perkembangannya)”*, Jakarta: Thafa Media Yogyakarta.
- Gaffar, Afan, 2009. *“Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, Boedi, 2004. *“Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)”*, Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi, 2008. *“Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya)”*, Jakarta: Djambatan.
- Kartasapoetra, G, 1992. *“Masalah Pertanahan di Indonesia”*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Sigit Sapto, et.al., 2017. *“Hukum Agraria Indonesia”*, Solo: Kafilah Publishing.
- R, I Nyoman Gede. 2017. *“Hukum Administrasi Negara”*, Bali: Universitas Panji Sakti.
- Santoso, Urip, 2010. *“Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Urip, 2011. *“Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Urip, 2012. *“Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)”*, Jakarta: Kencana.
- Sugiharto, Umar Said, Suratman, M., Noorhudha, 2015. *“Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)”*, Malang: Setara Press
- Supriadi, 2007. *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, 2008. *“Hukum Agraria”*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, dan Taufani, Galang, 2018. *“Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)”*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Sumber Lainnya

- Badan Pusat Statistik. 2018. “Jumlah Bidang Tanah Terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Menurut Kab/Kota, 2018”, diakses dari <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/08/282/jumlah-bidang-tanah-yang-terdaftar-di-badan-pertanahan-nasional-jawa-barat-menurut-kabupaten-kota-bidang-2016.html> pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 16.30.
- Benuf, Kornelius, dan Azhar, Muhamad, 2020. “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I.
- Dahlan, Ahmad dan Irfaan, Santosa, 2014. *Menggagas Negara Kesejahteraan*, El-Jizya Vol. II No. 1.
- Elviandri, Dimyati, Khuzdaifah, dan Absori, 2019. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2.
- Hadiyono, V, 2020. *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan Vo. 1 No. 1.
- Kusuma Ayu, Isdiyana. 2019. *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 3.
- Suparman, 2017. “*Peranan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris*”, Jurnal Warta Edisi 54.
- Supriyanto, 2008. “*Implementasi Kebijakan Pertanahan Nasional*”. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3.
- Tri Budhayati, Christiana. 2018. *Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA*. Refleksi Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 2 Nomor 2.
- Wahab Muslim, Irgan. 2019. “*BPN Tasik Targetkan 49 Ribu Bidang Tanah Bersertifikat*”, diakses dari <https://www.ayotasik.com/read/2019/10/05/3389/> pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 14.47.
- Website Resmi Kabupaten Tasikmalaya, 2021. “*Peta Administratif Kabupaten Tasikmalaya*” diakses dari <https://www.tasikmalayakab.go.id> pada tanggal 17 April 2021 pukul 20.34

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020. “Kabupaten Tasikmalaya”. diakses dari <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1046> pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 15.34.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

